

**BATASAN TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM  
PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
UTANG (PKPU) TERHADAP DEBITOR DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN  
2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**TESIS**

**Oleh:  
ROSALIA HIDAYAT  
1902190023**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**

**BATASAN TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM  
PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
UTANG (PKPU) TERHADAP DEBITOR DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN  
2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H.) Pada Program Studi Magister Hukum Program  
Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

**Oleh:**  
**ROSALIA HIDAYAT**  
**1902190023**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosalia Hidayat

NIM : 1902190023

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “BATASAN TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERHADAP DEBITOR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Apabila terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 27 Juni 2023



Rosalia Hidayat



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

BATASAN TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM PERKARA  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERHADAP  
DEBITOR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN  
2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG

Oleh:

Nama : Rosalia Hidayat  
NIM : 1902190023  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis  
guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum, Program  
Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 12 Juni 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.  
0327096504

Pembimbing II

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.  
0302117904

Ketua

Program Studi Hukum Program Magister

  

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.  
0327096504

Direktur

Program Pascasarjana

  

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.  
0320116402



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Pada tanggal 27 Juni 2023, telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum, Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Rosalia Hidayat  
NIM : 1902190023  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “BATASAN TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERHADAP DEBITOR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”, oleh Tim Penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji

Jabatan dalam Tim

Tanda Tangan

Penguji

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

Sebagai Ketua

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

Sebagai Anggota

Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.

Sebagai Anggota

Jakarta, 06 Juli 2023



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

---

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosalia Hidayat  
NIM : 1902190023  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Jenis Tugas Akhir : Tesis  
Judul : Batasan Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Debitor Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari Dosen Pembimbing dan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 06 Juli 2023



Rosalia Hidayat

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan mukjizat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Batasan Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Debitor Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Dengan selesainya tesis ini, Penulis berharap tesis ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan juga bagi Penulis mengenai batasan tanggung jawab penanggung dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap debitor dalam perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Adapun selesainya tesis ini tidak lepas dari doa, bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Sehingga dalam kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, antara lain kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

3. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dosen-Dosen Pembimbing Tesis Penulis.
6. Bapak Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H., selaku Dosen Pengaji Sidang Tesis Penulis.
7. Orang Tua yang Penulis Sayangi.
8. Suami dan Kedua Anak yang Penulis Sayangi dan Cintai.

Saya menyadari bahwa tesis yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan tesis ini.

Jakarta, 12 Juni 2023

Rosalia Hidayat  
NIM: 1902190023

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR .....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Maksud Penelitian .....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	7
1.4.1 Kerangka Teori .....	7
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.5.1 Objek Penelitian .....	13
1.5.2 Jenis Penelitian .....	14
1.5.3 Pendekatan Penelitian.....	14
1.5.4 Jenis dan Sumber Data .....	17

1.5.5 Teknis Pengumpulan Data .....	18
1.5.6 Teknis Analisis Data.....	18
1.5.7 Lokasi Penelitian .....	19
1.5.8 Orisinalitas/Keaslian Penelitian.....	19
1.6 Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
2.1 Tinjauan Umum Hukum Jaminan .....	23
2.1.1 Pengertian Hukum Jaminan.....	23
2.1.2 Unsur-Unsur Hukum Jaminan .....	25
2.1.3 Karakteristik Jaminan .....	26
2.1.4 Asas Hukum Jaminan .....	34
2.1.5 Manfaat Jaminan.....	35
2.1.6 Fungsi Jaminan .....	36
2.2 Tinjauan Umum tentang Jaminan Perorangan / Penanggungan ( <i>Borgtocht</i> )	
.....	37
2.2.1 Pengertian Jaminan Perorangan / Penanggungan ( <i>Borgtocht</i> ) .....	37
2.2.2 Bentuk Penanggungan .....	39
2.2.3 Tujuan Penanggungan .....	40
2.2.4 Sifat Penanggungan .....	41
2.3 Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	42
2.3.1 Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	42
2.3.2 Para Pihak dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	44
2.3.3 Jenis-jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	49

2.3.4 Konsekuensi / Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	51
2.4 Tinjauan Umum Teori Kepastian Hukum .....	53
2.5 Tinjauan Umum Teori Keadilan.....	56
<b>BAB III KEDUDUKAN PENANGGUNG / <i>BORGTOCHT</i> DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP DEBITOR .....</b>	<b>60</b>
3.1 Jaminan dalam Bentuk Penanggungan.....	60
3.2 Syarat Penanggungan .....	63
3.3 Hubungan Hukum Penanggung dengan Kreditor .....	68
3.4 Hak Istimewa Penanggung.....	70
3.5 Pelepasan Hak Istimewa terhadap Penanggung .....	75
3.6 Kedudukan Hukum Penanggung dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Debitor .....	83
<b>BAB IV BATASAN TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERHADAP DEBITOR .....</b>	<b>101</b>
4.1 Akibat Hukum setelah Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	106
4.2 Batasan Tanggung Jawab Penanggung dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Debitor .....	114
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>122</b>
5.1 Kesimpulan.....	122

5.2 Saran .....	123
DAFTAR PUSTAKA .....	125



## **ABSTRAK**

Pengikatan dengan pihak ketiga dalam bentuk penanggungan adalah bentuk perikatan terkait kebutuhan pemberi pinjaman terhadap peminjam. Jika debitör wanprestasi, maka penanggung tidak dapat langsung diminta kreditor untuk membayar. Artinya, penanggung bisa menyatakan agar benda-benda debitör dieksekusi dahulu untuk mempertanggungjawabkan utang tersebut sebagaimana terdapat di Pasal 1831 KUHPerdata. Adapun, hal itu tidak terjadi apabila penanggung telah melepaskan hak istimewa yang dilindungi dalam KUHPerdata. Sehingga dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), acapkali ditemukan penanggung ditarik sebagai termohon bersama dengan debitör apabila debitör lalai memenuhi kewajibannya. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kedudukan dari penanggung dan tanggung jawab penanggung dalam perkara PKPU.

Hasil dari penelitian ini adalah tidak adanya kepastian hukum terkait kedudukan penanggung yang ditarik sebagai termohon dalam kasus PKPU karena telah melepaskan hak istimewa. Terdapat beberapa pendapat dinyatakan oleh ahli yang pada pokoknya penanggung tidak dapat dilibatkan sebagai termohon di permohonan PKPU karena PKPU bertujuan restrukturisasi kewajiban utang, tentunya yang dapat dimintakan pertanggung jawaban adalah debitör utama bukan penanggung. Adapun dalam tahap pengajuan atau pendaftaran piutang dalam proses PKPU terhadap debitör dan penanggung membuat tidak adanya batasan tanggung jawab penanggung dimana kreditor yang memegang pengikatan penanggung dapat mendaftarkan permohonan dan/atau mendaftarkan piutangnya tidak hanya terhadap debitör utama namun juga terhadap penanggung atas satu utang yang sama dan hal tersebut tentunya sangat merugikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

**Kata kunci:** Debitor, Penanggung, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## **ABSTRACT**

*Binding with third parties in the form of underwriting is a form of engagement related to the needs of the lender for the borrower. If the debtor defaults, then the guarantor cannot be directly asked by the creditor to pay. That is, the guarantor can declare that the debtor's objects are executed first to account for the debt as contained in Article 1831 of the Civil Code. Meanwhile, this does not happen if the insurer has released the privileges protected in the Civil Code. So that in the application for Suspension Of Payment (PKPU), it is often found that the guarantor is withdrawn as the respondent together with the debtor if the debtor fails to fulfill his obligations. Thus the purpose of this study is to analyze how the position of the insurer and the responsibility of the insurer in the PKPU case.*

*The result of this study is that there is no legal certainty regarding the position of the insurer who was withdrawn as the respondent in the PKPU case because he had relinquished his privileges. There are several opinions expressed by experts that basically the guarantor cannot be involved as a respondent in the PKPU application because PKPU aims to restructure debt obligations, of course those who can be held accountable are the main debtor not the guarantor. As for the stage of submitting or registering receivables in the PKPU process for debtors and guarantors, there is no limit to the responsibility of the guarantor where the creditor holding the guarantor's binding can register applications and/or register their receivables not only to the main debtor but also to the guarantor for the same debt and This is of course very detrimental and creates legal uncertainty.*

**Keywords:** Debitor, Insurer, Suspension Of Payment.